



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DIDI SUKYADI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **277339**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.485.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 246.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
3. Tanah Seluas 949 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
4. Tanah Seluas 12.744 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 51.500.000
5. Tanah Seluas 680 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/225 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 713.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 715.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/200 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 262.000.000
9. Tanah Seluas 1.052 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 535.000.000**



1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

2. MOBIL, HYUNDAI CRETA LOW SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 250.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 700.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.970.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.970.500.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.